



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B.498 /M.PPN/D.8/PP.05.04/11/2017 Jakarta, 24 November 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP SBSN)
Tahun Anggaran 2018

Yth. Menteri Keuangan
di Jakarta

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2011 mengamanatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun Daftar Prioritas Proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN (DPP SBSN). DPP SBSN disusun berdasarkan usulan proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek (Kementerian/Lembaga) dan dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Batas Maksimum Penerbitan SBSN (BMP SBSN) dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.
2. BMP SBSN untuk Tahun Anggaran (TA) 2018 telah ditetapkan melalui surat nomor S-282/MK.08/2017 tanggal 29 Maret 2017, yaitu sebesar Rp22.526,59 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2017 dilakukan *Trilateral Meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Pemrakarsa Proyek (Kementerian/Lembaga) yang hasilnya adalah penetapan nilai proyek SBSN TA. 2018 sebesar Rp22.526.588.352.747,00.
3. Pada TA. 2018 terdapat 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah melengkapi dokumen pendukung Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Studi Kelayakan Proyek (DSKP), dan telah mendapatkan rekomendasi terhadap kesiapan, kelayakan, serta keselarasan prinsip syariah, dengan nilai sebesar Rp22.526.588.352.747,00, untuk ditetapkan dalam DPP SBSN TA. 2018.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan DPP SBSN TA. 2018 sebagaimana dalam Lampiran I. Sebagai dasar pertimbangan penetapan DPP SBSN TA. 2018 terlampir disampaikan juga tabel Lampiran II. Mohon kiranya Saudara Menteri dapat melakukan proses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama;
2. Yth. Menteri Perhubungan;
3. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Yth. Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
6. Yth. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
7. Yth. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Lampiran I Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor : B.498 /M.PPN/D.8/PP.05.04/11/2017

Tanggal : 24 November 2017

Daftar Prioritas Proyek Surat Berharga Syariah Negara TA. 2018

Kategori		Nilai Proyek (Rp)
KEMENTERIAN AGAMA		2.210.553.581.747
<i>Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah</i>		
1	Pembangunan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji di 8 lokasi	349.744.000.000
<i>Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam</i>		
2	Proyek Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di 245 lokasi	355.377.323.348
<i>Direktorat Jenderal Pendidikan Islam</i>		
3	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Madrasah di 32 lokasi	201.432.258.399
4	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana PTKIN di 34 lokasi	1.304.000.000.000
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		7.000.000.000.000
1	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara)	392.090.675.600
2	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto - Kroya Lintas Cirebon - Kroya Segmen III	205.086.399.000
3	Pembangunan Jalan KA Layang di Perkotaan Medan (Tahap I antara Medan-Bandar Khalifah Baru Lintas Medan-Araskabu-Kualanamu)	44.917.052.000
4	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo - Surabaya antara Madiun-Jombang	666.809.372.000
5	Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo	1.195.312.000.000
6	Pembangunan Jalur Ganda KA Solo - Kedungbanteng	671.387.509.000
7	Pembangunan Jalur Ganda Madiun - Kedungbanteng	780.260.500.000
8	Pembangunan Jalur KA lintas Rantau Prapat - Kota Pinang	400.000.000.000
9	Pembangunan KA Langsa - Besitang	352.978.383.000
10	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Makassar - Parepare Segmen 2 (Barru - Parepare)	681.368.291.000
11	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	538.932.917.400
12	Pembangunan Jalan KA antara Binjai - Besitang	313.305.204.000
13	Pembangunan Jalan KA lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung	346.827.451.000
14	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja - Rangkasbitung	225.707.130.000
15	Pembangunan Prasarana Pendukung Jalur Ganda KA antara Purwokerto - Kroya lintas Cirebon-Kroya Segmen III	185.017.116.000

No	Instansi/Kegiatan/Proyek	Nilai Proyek (Rp)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		12.780.000.000.000
<i>Direktorat Jenderal Bina Marga</i>		<i>7.500.000.000.000</i>
1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.723.400.000.000
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.776.600.000.000
<i>Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</i>		<i>5.280.000.000.000</i>
3	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	463.585.000.000
4	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai	2.430.236.000.000
5	Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	389.819.000.000
6	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	1.996.360.000.000
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		51.400.000.000
1	Pembangunan Suaka Paruh Bengkok di TN Aketajawe Lolobata	5.310.194.000
2	Pembangunan Jalan Wisata Batangan-Bama di Taman Nasional Baluran	20.707.000.000
3	Pembangunan Komplek Wisata Alam Mandalawangi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	4.909.450.000
4	Pembangunan Komplek Wisata Alam Situgunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	10.591.908.000
5	Pembangunan Komplek Wisata Alam Salabintana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	9.881.448.000
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI		314.634.771.000
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kampus IPB Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park	185.000.000.000
2	Percepatan Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA)	129.634.771.000
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)		50.000.000.000
1	Pengembangan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	50.000.000.000
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)		120.000.000.000
1	Pembangunan Laboratorium Bio Safety Level 3 untuk Penelitian Pangan dan Obat	55.000.000.000
2	Pembangunan Laboratorium Metrologi Fisik dan Kimia untuk Pengujian Mutu Produk	65.000.000.000
TOTAL		22.526.588.352.747

Lampiran II Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor : B.498 /M.PPN/D.8/PP.05.04/11/2017

Tanggal : 24 November 2017

**Rekapitulasi Usulan Proyek dari Tujuh Kementerian/Lembaga
yang akan Dibiayai melalui SBSN TA. 2018**

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rupiah)	Dasar Pertimbangan
1.	KEMENTERIAN AGAMA	2.210.553.581.747	
	a. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah <ul style="list-style-type: none">Perencanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji	349.744.000.000	<ol style="list-style-type: none">Mendukung RPJMN 2015-2019 bidang Agama, dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.Surat usulan no: B-10193/SJ/B.I.1/KU.00.2/06/2017, tanggal 22 Juni 2017Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012
	b. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam <ul style="list-style-type: none">Pembangunan Gedung Balai Nikah dan manasik Haji KUA	355.377.323.348	<ol style="list-style-type: none">Mendukung RPJMN 2015-2019 bidang Agama, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan agama, seperti layanan nikah, manasik haji, pengelolaan wakaf dan zakat.Surat usulan no: B-10431/SJ/B.I.1/KU.00.2/07/2017, tanggal 17 Juli 2017Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rupiah)	Dasar Pertimbangan
	c. Ditjen Pendidikan Islam <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Madrasah 	201.432.258.399	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung RPJMN 2015-2019 bidang pendidikan, utamanya dalam hal pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan perluasan serta pemerataan pendidikan menengah melalui peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Dalam hal ini melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di madrasah. Surat usulan no: B-10193/SJ/B.I.1/KU.00.2/06/2017, tanggal 22 Juni 2017 Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 	1.304.000.000.000	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung RPJMN 2015-2019 bidang pendidikan, utamanya dalam hal pemerataan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Surat usulan no: B-10431/SJ/B.I.1/KU.00.2/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012
2.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7.000.000.000.000	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung percepatan pencapaian target

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rp)	Dasar Pertimbangan
			<p>pembangunan jalur ganda KA di Sumatera dan Lintas Selatan Jawa, pembangunan KA Trans Sumatera dan pembangunan KA Trans Sulawesi</p> <p>2. Surat usulan no: KU.002/34/25 Phb 2017, tanggal 12 Oktober 2017</p> <p>3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.</p> <p>4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.</p> <p>5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012</p>
3.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	12.780.000.000.000	
	a. Direktorat Jenderal Bina Marga <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 	7.500.000.000.000 5.723.400.000.000	1. Mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dalam rangka penguatan daya saing. Mendukung RKP 2018 untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Industri (KI). Mendukung konektivitas nasional, dukungan atas pelabuhan dan bandara, dan dukungan ketahanan pangan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Jalan dan Jembatan 	1.776.600.000.000	2. Surat usulan no: PR.01.02-Mn/623, tanggal 17 Juli 2017 3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia. 4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek. 5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012
	b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5.280.000.000.000	1. Mendukung sasaran pembangunan dalam RPJMN

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rupiah)	Dasar Pertimbangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak 	463.585.000.000	<p>2015-2019 dalam hal: Peningkatan kesejahteraan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri dan tersedianya sarana dan prasarana irigasi, Kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu, Pemerataan pembangunan antar wilayah</p> <p>2. Surat usulan no: PR.01.02-Mn/623, tanggal 17 Juli 2017</p> <p>3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.</p> <p>4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.</p> <p>5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai 	2.430.236.000.000	<p>1. Mendukung sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dalam hal bidang sarana dan prasarana untuk menjamin ketahanan air, perlindungan terhadap daya rusak air dan mendukung ketahanan nasional.</p> <p>2. Surat usulan no: PR.01.02-Mn/623, tanggal 17 Juli 2017</p> <p>3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.</p> <p>4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.</p> <p>5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012</p>

No.	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rupiah)	Dasar Pertimbangan
			<p>layanan mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi dan pengujian mutu.</p> <p>2. Surat usulan no: 1391/BSN/A0-b1/05/ 2017, tanggal 17 Mei 2017</p> <p>3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.</p> <p>4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.</p> <p>5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012</p>
7.	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)	120.000.000.000	
	a. Pembangunan Laboratorium Metrologi Fisik dan Kimia untuk Pengujian Mutu Produk	65.000.000.000	<p>1. Mendukung RPJMN 2015-2019 dalam hal peningkatan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi melalui layanan mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi dan pengujian mutu.</p> <p>2. Surat usulan no: B-4470/SU/KU.03/V/2017, tanggal 17 Mei 2017</p> <p>3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia.</p> <p>4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.</p> <p>5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012</p>
	b. Pembangunan Fasilitas Bio Safety Lab (BSL) Level 3 untuk Penelitian Pangan dan Obat	55.000.000.000	<p>1. Mendukung RPJMN 2015-2019 dalam hal peningkatan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi melalui layanan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana perekayasaan, desain dan pengujian.</p>

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Proyek (Rupiah)	Dasar Pertimbangan
			2. Surat usulan no: B-4470/SU/KU.03/V/2017, tanggal 17 Mei 2017 3. Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek (KAK dan DSKP) sudah tersedia. 4. Usulan proyek sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek. 5. Usulan proyek sudah selaras dengan Ketetapan DSN-MUI: No.01/DSN-MUI/III/2012
	TOTAL	22.526.588.352.747	